

Kontribusi Masyarakat dalam Perspektif Ketahanan Nasional Indonesia di Era Digital

Mariska Dwi Amanda^{1*}, Ari Metalin Ika Puspita², Frischa Amalia Imanda³, Muhammad Ridho Maulana⁴, Gunawan Santoso⁵

^{1, 2, 3, 4} Universitas Negeri Surabaya

⁵ Universitas Muhammadiyah Jakarta

*Corresponding email: mariska.22068@mhs.unesa.ac.id

Abstrak - Untuk menjamin kelangsungan ekonomi nasional Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ketahanan nasional dapat memperkuat negara secara langsung dan tidak langsung dalam mengatasi berbagai masalah dan kegiatan yang membahayakan kedaulatan negara, baik di dalam maupun di luar. Fokus penelitian adalah mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (AGHT). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Ketahanan Nasional Indonesia, jadi penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut tujuan penelitian, metode kualitatif bertujuan untuk memahami, menampilkan, dan menafsirkan suatu peristiwa tentang bagaimana interaksi tingkah laku manusia terjadi dalam situasi tertentu dari sudut pandang peneliti. Setiap bagian dari negara atau masyarakat sipil bertanggung jawab atas pertahanan negara. Masyarakat sipil bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan negara dari ancaman, baik yang berasal dari sumber militer maupun non militer, serta dari sumber internal dan eksternal, seperti ideologi, ekonomi, sosial, dan budaya. pentingnya prinsip multikulturalisme untuk membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan harmonis. Struktur abstrak ini menekankan pentingnya memahami dan menghargai perbedaan budaya dan berusaha untuk mendorong hubungan yang saling menghormati antara kelompok budaya yang berbeda.

Kata kunci: Ketahanan Nasional, Pendidikan Kewarganegaraan, Geostrategis

Abstract -National resilience has the resilience to strengthen the State directly and indirectly in overcoming various problems and activities that endanger state sovereignty inAternally and externally to ensure the continuity of the Indonesian national economy and the Unitary State of the Republic of Indonesia in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution. This research aims to to face threats, challenges, obstacles and disturbances (AGHT). This research uses descriptive research with a qualitative approach, in accordance with the aim of this research, namely analyzing National Resilience in Indonesia. In accordance with the aim of this research, analyzing National Resilience in Indonesia, namely the qualitative method seeks to understand, explain and interpret the meaning of an event involving human behavior in certain situations according to the researcher's own perspective. National defense is a responsibility for all components of the nation or state, civil society, defense and resilience must still be strengthened, civil society plays a role in maintaining and protecting the sovereignty of the country, the territorial integrity of the Republic of Indonesia and safety from threats, for example military and non-military threats that continue to be internal and external. includes ideology, politics, economics, social and culture.

Keywords: National Resilience, Citizenship Education, Geostrategis

Pendahuluan

Tempatnya yang strategis membuat Indonesia unik. Diletakkan di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra (Hindia dan Pasifik), ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan kata lain, Indonesia dikenal sebagai "Nusantara", yang berarti "pulau di antara pulau." Selain itu, negara memiliki garis khatulistiwa yang dilewati oleh orbit satelit geostationary (GSO) (Suryatni, n.d.). Ketahanan nasional adalah kondisi negara yang selalu berubah, yang mencakup semua aspek kehidupannya. Ketahanan nasional memiliki kekuatan untuk memperkuat negara secara langsung dan tidak langsung untuk menjamin kelangsungan ekonomi nasional Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan utama ketahanan nasional adalah menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (AGHT) (Amalia Setyaningrum et al., n.d.). Namun, analisis kehidupan berbangsa menunjukkan bahwa pemahaman nusantara masih kurang, dan lima pengetahuan nusantara belum diserap sepenuhnya oleh semua orang Indonesia. terutama oleh para pemimpin di tingkat nasional yang bertanggung jawab atas masalah infrastruktur dan masalah tingkat tinggi di tingkat pusat dan daerah. Pemimpin memiliki kedua hak dan kewajiban untuk memimpin dan menggerakkan bangsa untuk mencapai tujuan (Budisantoso, 1997).

Metode

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui secara mendalam bagaimana analisis Ketahanan Nasional di Kalangan Masyarakat dengan itu peneliti melakukan observasi menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjawab masalah penelitian data. Metode ini biasanya terdiri dari narasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan penelitian literature (Santoso, Rantina, et al., 2023). Dalam observasi peneliti mendapatkan Narasumber dari Saudara Dwi Santoso untuk mendapatkan hasil wawancara mendalam, yang mana dengan ini peneliti mendapat informasi untuk pembuatan artikel tersebut. Wawancara mendalam bertujuan untuk mengetahui pendapat serta bagaimana pandangan masyarakat mengenai Ketahanan Nasional. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang Ketahanan Nasional di Kalangan Masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Menurut narasumber, ketahanan nasional adalah kemampuan sebuah negara untuk melindungi dan mempertahankan diri dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Ini penting karena merupakan salah satu cara untuk melindungi negara dari teroris dan non-teroris, serta merupakan bagian penting dari keamanan rakyat dan stabilitas internal (Santoso, Abdulkarim, Maftuh, & Rantina, 2023a). Dan militer juga memiliki peran dalam ketahanan nasional sendiri yaitu, untuk melindungi

kepentingan nasional, menjaga kedaulatan, integritas wilayah, dan keamanan negara dari bahaya internal maupun eksternal. Contohnya seperti ketahanan teritorial, militer bertanggung jawab menjaga Batasan Batasan teritorial dari implasi dan ancaman ancaman musuh. Keamanan internal seperti pemberantasan terorismes didalam negeri. Kebijakan luar negeri dalam mendukung ketahanan nasional suatu negara adalah dengan sedemikian rupa. Mungkin beberapa contohnya itu seperti membantumelindungi keutuhan nasional, menjaga dan meningkatkan keamanan nasional, menjaga keutuhan ideologi suatu negara, mewujudkan kemakmuran ekonomi suatu negara. Memang dalam suatu ketahanan nasional memiliki ancaman atau tantangan didalamnya.

Salah satunya itu ancaman asimetris. Ini menurut pandangan saya atau sepengetahuan saya mengenai ancaman asimetris, seperti Ancaman asimetris adalah pertikaian yang terjadi tidak menggunakan senjata fisik, tetapi menggunakan ide ide untuk menjatuhkan lawan (Santoso, Syahrini, Asbari, Fitriani, et al., 2023g). Ancaman asimetris ini menggunakan strategi yang modern serta potensi ancaman asimetris ini sangat besar ditengah keberagaman bangsa indonesia sehingga kita bangsa indoensia patut mengantisipasi dengan menjaga persatuan di negara kita. Setiap bagian dari negara atau masyarakat sipil bertanggung jawab atas pertahanan negara. Masyarakat sipil bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan negara dari ancaman yang tidak hanya berasal dari militer tetapi juga dari sumber eksternal, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Pertahanan teritorial memiliki peran sebagai ketahanan nasional, menurut saya pertahanan nasional sendiri memiliki pengertian strategi pertahanan yang melibatkan perlindungan. Wilayah suatu negara dari ancaman internal dan eksternal ini berperan dalam pertahanan nasional dalam melindungi negara dari ancaman langsung menjaga kedaulatan dan integritas teritorial memastikan keamanan sosial dan memberikan efek penangkalan terhadap kontraksi ancaman membatalkan Masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah (Santoso, Syahrini, Asbari, Fitriani, et al., 2023g). Bentuk Kerjasama internasional yang memperkuat ketahanan nasional suatu negara itu bisa dilakukan dengan beberapa cara, contohnya menurut saya ialah pertukaran intelejen, pelatihan militer bersama, perdagangan senjata, perlindungan ancaman terhadap sesama , dan deplomasi perjanjian. Salah satu tantangan terbesar dalam membangun ketahanan nasional di wilayah kepulauan Indonesia yang luas adalah logistik dan konektivitas.

Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di seluruh kepulauan, sehingga distribusi sumber daya, personel, dan informasi menjadi sangat sulit. Solusi inovatif dapat mencakup: Teknologi, Infrastruktur, Kolaborasi, Pelatihan dan Pendidikan, Sistem Informasi Geografis (SIG), Pemberdayaan masyarakat (Meiliza et al., 2022). Pentingnya solusi inovatif dalam konteks ini adalah untuk mengatasi kendala geografis yang unik di Indonesia dan memastikan bahwa ketahanan nasional dapat dijaga dengan efektif di seluruh wilayah kepulauan. Narasumber percaya bahwa masyarakat

berhak berpartisipasi dalam ketahanan nasional karena, sebagai warga negara, setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pertahanan negaranya, termasuk dalam hal ketahanan nasional. Kedua, ketahanan mencakup semua aspek: pelaksana dan pembuat kebijakan, pencegahan dan deteksi dini, dan kewajiban warga negara. Selain memiliki hak, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk melindungi keutuhan dan kedaulatan negara.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam ketahanan nasional tidak hanya merupakan hak tetapi juga esensi dari ketahanan itu sendiri. Ketika ketahanan nasional melemah, ternyata memiliki pengaruh terhadap hubungan persebaran penduduk (Santoso, Abdulkarim, Maftuh, & Murod, 2023a). Yang mana dapat berpengaruh pada kerentanan terhadap ancaman eksternal, kesenjangan sosial ekonomi, terbatasnya sumber daya, keterbatasan kemampuan pertahanan, ketidakseimbangan pengembangan ekonomi, Akan tetapi untuk mengatasi pengaruh negatif dari persebaran penduduk yang tidak merata terhadap ketahanan nasional, mungkin saja pemerintah dapat merancang kebijakan yang mendukung pembangunan merata, pengembangan infrastruktur, dan distribusi sumber daya yang adil. Hal ini akan membantu memperkuat ketahanan nasional dengan mengurangi kerentanan terhadap ancaman dan menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di seluruh wilayah negara. Untuk memperkuat ketahanan nasional, pemerintah dapat melakukan hal-hal dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mempertahankan ketahanan nasional. Ketahanan nasional sangat terkait dengan geostrategis, dan elemen geostrategis dapat berdampak besar pada ketahanan nasional.

Keamanan wilayah, akses ke sumber daya, kendali jalur perdagangan, kepentingan strategis, dan ancaman potensial adalah beberapa cara geostrategi dan ketahanan nasional berhubungan. Banyak hal yang mendorong Indonesia untuk membangun ketahanan nasional, menurut pendapat saya. dengan mempertimbangkan dan mengingat beberapa komponen yang ada (Fahrezi et al., 2023). Mungkin dengan mempertimbangkan masa lalu perjuangan untuk kemerdekaan. Saya percaya bahwa sumber inspirasi pertama berasal dari sejarah perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Contoh semangat, tekad, dan keberanian yang luar biasa yang ditunjukkan oleh rakyat Indonesia dalam perjuangan mereka untuk memperoleh kemerdekaan dari penjajah Belanda adalah perjuangan mereka untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika. Yang mana "Bhinneka Tunggal Ika" atau "Berbeda-beda namun tetap satu" memiliki prinsip mencerminkan keragaman budaya, agama, etnis, dan bahasa di Indonesia. Inspirasi ini mengajarkan pentingnya persatuan dalam keanekaragaman dan membentuk 12 kesatuan bangsa yang kokoh. Ketiga, kemandirian dan kreativitas. Semangat untuk mandiri dan kreatif dalam mengatasi tantangan dan mengembangkan potensi bangsa telah menjadi sumber inspirasi. Pencapaian dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga adalah contoh nyata dari hal ini yaitu semangat gotong royong, gotong royong sendiri menjadi tradisi solidaritas sosial di Indonesia yang telah mengilhami

upaya bersama untuk mengatasi bencana alam, krisis ekonomi, dan masalah sosial lainnya. Semangat ini membantu memperkuat ketahanan nasional. Keempat, nilai-nilai Pancasila.

Dasar negara Pancasila, yang terdiri dari lima prinsip dasar memberikan inspirasi dalam membangun ketahanan nasional yang inklusif dan berkeadilan. Kelima, perkembangan ekonomi dan kesejahteraan (Santoso, Marcellia, et al., 2023). Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia juga dapat menjadi sumber inspirasi untuk membangun ketahanan nasional. Kemajuan ekonomi memberikan stabilitas dan keamanan dalam negeri. lingkungan dan keberlanjutan, kesadaran akan pentingnya lingkungan dan keberlanjutan juga merupakan faktor inspirasi. Kepedulian terhadap alam dan lingkungan hidup mendorong upaya untuk melindungi sumber daya alam dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Faktor faktor diatas memberikan inspirasi kepada seluruh penduduk bangsa Indonesia untuk membangun ketahanan nasional yang kuat, mencapai tujuan bersama, dan menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan.

Ketahanan berasal dari akar kata “tahan”. Bertahan dalam penderitaan, kuatkan diri, kendalikan diri dan pantang menyerah. Ketahanan berarti berbicara tentang kekuatan, tekad, dan ketabahan. Dengan kata lain, ketahanan nasional berarti kuat dan kokoh dalam kerangka kesadaran, dan kebangsaan berarti suatu bangsa yang hidup di suatu wilayah dan mempunyai kedaulatan (Santoso, Karim, et al., 2023c). Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “ketahanan nasional” adalah tekad untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Makna "endurance" dan "resistence" dalam bahasa Inggris memiliki arti yang lebih stabil dan fleksibel dibandingkan dengan makna asli mereka, "ketahanan nasional". Ketahanan nasional adalah keadaan dinamis suatu bangsa yang meliputi keuletan dan ketangguhannya, termasuk kemampuan mengatasi segala tantangan dan ancaman, baik dari luar maupun dari dalam, yang secara langsung maupun tidak langsung membahayakan keutuhan bangsa. Ketahanan nasional juga mencakup kemampuan untuk membangun kekuatan nasional untuk menghadapi tantangan, rintangan, dan gejolak, jati diri, kelangsungan hidup negara, dan perjuangan untuk mencapai tujuannya. Ketahanan nasional harus ditingkatkan seiring dengan perkembangan saat ini karena konteks dan kondisi terus berubah.

Ada tiga "wajah" ketahanan nasional jika kita melihatnya secara menyeluruh, dengan beberapa persamaan dan beberapa perbedaan antara lain:

1. Ketahanan Sebagai bangsa yang dinamis, Hal-hal yang ada dalam masyarakat dapat diamati dengan panca indera manusia. ATHG penting di satu sisi, dan di sisi lain hadirnya keuletan dan ketekunan penting untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi ancaman.
2. Ketahanan nasional sebagai suatu konsep pengaturan dan pengendalian nasional memerlukan dibangunnya hubungan antara dimensi kesejahteraan (IPOLEKSOSBUD) dan keamanan (pertahanan). Konsep peraturan ini menjelaskan tentang ciri dan ciri ketahanan nasional, serta tujuan ketahanan nasional.

3. Ketahanan nasional sebagai cara berpikir mempunyai arti suatu pendekatan khusus yang berbeda dengan cara berpikir lainnya. Dalam ilmu pengetahuan di kenal dengan metode induktif dan deduktif. Hal ini juga berlaku untuk keamanan nasional dan selanjutnya semua ghatra dianggap sebagai keseluruhan yang komprehensif (Sigit Dwi, 2001).

Jika suatu negara ingin mewujudkan ketahanannya sebagai negara, ketahanannya harus dipahami secara menyeluruh dan terpadu secara sosial dan pribadi. Setiap komponen bangsa harus bekerja sama untuk memperjuangkan ketahanan nasional, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas mereka. Oleh karena itu, kita semua bertanggung jawab atas ketahanan nasional, bukan hanya Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia (Bintang et al., 2022). Untuk mencapai ketahanan nasional melalui penggunaan geopolitik dan geostrategi Indonesia di abad ke-21, sangat penting untuk memahami kompleksitas masalah keamanan yang dihadapi Indonesia saat ini. Memahami dinamika hubungan internasional dan kebijakan luar negeri Indonesia di era persaingan dan globalisasi membutuhkan perspektif geopolitik dan geostrategi. Sebagai negara maritim dengan banyak pulau dan wilayah yang harus dikelola, Indonesia harus dapat menangani masalah agama, etnis, budaya, dan pertahanan terhadap ancaman bukan militer yang merugikan keamanan nasional. Selain itu, Indonesia harus meningkatkan kekuatan ekonominya secara regional dan nasional serta meningkatkan pertahanan militernya.

Untuk mendorong analisis dan diskusi yang lebih dalam tentang tantangan keamanan serta elemen yang dapat membantu Indonesia dalam mengantisipasi ancaman regional dan global, ketahanan nasional menjadi penting. Studi ini akan memiliki kemampuan untuk menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan ketahanan nasional Indonesia dan mengatasi tantangan keamanan (Santoso, Karim, et al., 2023c). Selain itu, seperti yang ditunjukkan oleh kajian ketahanan nasional Indonesia, Indonesia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk memanfaatkan potensinya saat ini dan mencapai tujuan negaranya dengan lebih efisien. Indonesia dapat memanfaatkan moment geopolitik untuk meningkatkan posisinya di kancah internasional karena memiliki potensi ekonomi dan politik yang luar biasa. Pada saat yang sama, Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai masalah, seperti keamanan nasional, konflik regional, bencana alam, dan perubahan iklim. Untuk menangani masalah ini, Indonesia harus mampu membangun kerjasama yang kuat di tingkat regional dan internasional. Ini akan memberinya posisi yang lebih kuat secara strategis. Akibatnya, untuk membuat Indonesia memiliki rencana yang tepat untuk menghadapi tantangan global, pemerintah, masyarakat, dan lembaga swasta harus aktif terlibat dalam penelitian ketahanan nasional. Indonesia dapat meningkatkan posisinya di kancah internasional dengan memanfaatkan peluang geopolitik karena potensi ekonomi dan politiknya yang luar biasa.

Pada saat yang sama, Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai masalah, seperti keamanan nasional, konflik regional, bencana alam, dan perubahan iklim. Untuk menangani

masalah ini, Indonesia harus mampu membangun kerjasama yang kuat di tingkat regional dan internasional. Ini akan memberinya posisi yang lebih kuat secara strategis. Oleh karena itu, penelitian ketahanan nasional memerlukan partisipasi aktif dari pemerintah, masyarakat, dan organisasi swasta (Santoso, Abdulkarim, Maftuh, & Murod, 2023b).

TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional untuk mewujudkan ketahanan nasional. Mereka mengadopsi nilai-nilai demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, dan hukum nasional dan internasional yang telah disetujui dan diterapkan dalam peran-peran berikut:

a. TNI memiliki peran yang sangat strategis sebagai kekuatan pertahanan negara. Ini sesuai dengan UU, yang menetapkan bahwa TNI berfungsi sebagai alat negara dalam bidang pertahanan dan menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Militer sebagai pertahanan negara, berfungsi sebagai: penangkal setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan negara, baik di dalam maupun di luar negeri. Penindakan setiap ancaman. Memulih terhadap situasi keamanan negara yang tidak stabil.

b. Sebagai kekuatan moral

Sesuai dengan UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, TNI berfungsi sebagai kekuatan moral untuk mendeteksi ancaman non-militer. Jika komponen sipil kurang waspada terhadap ancaman tersebut, TNI bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau departemen yang berwenang sebagai unsur utama. Ini digunakan untuk mendeteksi ancaman dari bidang ideologi (Liberal, Khilafah Islamiah, Komunis Gaya Baru), politik (politik demokrasi liberal dan konservatif), atau ideologi (Liberal, Liberal, dan Komunis Gaya Baru). Tujuannya adalah untuk mencegah ancaman di bidang Ipoleksosbud memasuki atau mengganggu kehidupan masyarakat Indonesia dengan cara yang dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

c. Sebagai kekuatan kultural

Sebagai kekuatan kultural, TNI memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan semangat dan mempertahankan budaya dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia baik di dalam TNI maupun di dalam masyarakat sehingga masyarakat menjadi sadar akan membela Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak kenal menyerah untuk menyelamatkan dan memelihara keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (*No Title* □□□□, n.d.).

Kebijakan Luar Negeri Dalam Mendukung Ketahanan Nasional Suatu Negara: Konsep politik luar negeri bebas aktif sering dibicarakan tentang cara Indonesia menangani konflik antara Rusia dan Ukraina. Selain menjadi netral, perspektif politik di luar negeri harus benar-benar berdampak pada krisis dan berkaitan dengan kebijakan luar negeri negara-bangsa (Santoso, Abdulkarim, Maftuh, & Murod, 2023a). Ini menunjukkan bagaimana kebijakan negara lain memengaruhi suatu negara, baik

positif maupun negatif. Kepentingan nasional sangat penting dalam proses pengambilan keputusan dalam hal kebijakan. Geografi, sejarah, sumber daya (ekonomi), mitra, populasi, dan etnis adalah semua elemen yang membentuk kepentingan nasional. Jutta Weldes berpendapat bahwa politik internasional bergantung pada kepentingan nasional. Dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama mencakup pemahaman para pembuat kebijakan tentang kepentingan nasional untuk memahami tujuan kebijakan internasional.

Komponen ofensif akan membuat ide untuk mencapai tujuan dan menghitung keberhasilan dan kerugian kebijakan. Tapi komponen pertahanan dimaksudkan untuk mencegah negara lain jika kepentingan suatu negara terancam dan menjadi rencana ketika pencegahan itu tidak berhasil (Hutabarat, 2022) (Santoso, Rizqy, et al., 2022). Jadi, membentuk dasar untuk tindakan negara. Kedua, berfungsi sebagai alat retorik untuk mendukung tindakan politik dan legitimasi negara, memungkinkan negara untuk bertindak. Istilah "kepentingan nasional" digunakan sebagai alat untuk menganalisis strategi saat menggambarkan, menjelaskan, dan menilai kebijakan luar negeri suatu negara. Pola seperti ini akan membantu orang yang membuat keputusan mencapai tujuan strategis mereka. Keputusan yang sudah dibuat akan lebih mudah dipahami melalui interpretasi pemikiran taktis. Strategi terdiri dari dua bagian: komponen ofensif dan pertahanan.

Oleh karena itu, melalui diplomasi, kerjasama internasional, dan penanganan konflik yang bijak, kebijakan luar negeri dapat membantu ketahanan suatu negara. Melibatkan diri dalam perjanjian lingkungan, perdagangan, dan keamanan dapat memperkuat posisi suatu negara di pasar global. "Asimetris" didefinisikan dalam literatur pertahanan dan hubungan internasional sebagai perbedaan yang signifikan dalam "kekuatan" antara dua pihak yang terlibat dalam konflik. Kekuatan material termasuk militer profesional yang besar, ekonomi yang maju, dan senjata canggih (Santoso, Khairasyani, Listiani, Rachmadani, et al., 2023e). Perang asimetris mencakup konflik antar negara dan kelompok; ini biasanya disebut sebagai "perang sipil" atau "perang saudara". Di sisi lain, perang simetris terjadi ketika dua pihak memiliki kekuatan militer dan sumber daya yang sama, menerapkan taktik yang sama, tetapi detail dan hasilnya berbeda. Perang asimetris juga disebut sebagai perang gerilya, pemberontakan, terorisme, konflik intensitas rendah, perang generasi ke-4, dan perang irreguler, antara lain.

Kekuatan militer pihak lawan menghalangi strategi pihak yang lemah untuk bertindak (*Dikutip Dari Buffaloe (2006).*, 2006). Perang asimetris juga merupakan konflik di mana militer formal melawan militer informal melakukan kekerasan (Santoso, Fatmawati, Syafa, & Zahra, 2023b). Meskipun kedua kelompok ini tidak memiliki kekuatan militer yang lengkap, mereka sangat militan. Dalam perang asimetris, kedua pihak berusaha untuk menggunakan strategi dan taktik perang konvensional dan non-konvensional untuk memanfaatkan kelemahan lawan. Pihak militer yang lebih

lemah berusaha menggunakan taktik yang lebih jitu untuk mengimbangi kekurangannya dalam jumlah atau kualitas.

Peran masyarakat sipil dalam pertahanan nasional suatu negara dapat beragam, mulai dari membangun kesadaran bela negara hingga membantu mengawasi sektor keamanan secara demokratis. Di Indonesia, masyarakat sipil juga diharapkan dapat berkontribusi pada pertahanan nasional dengan membantu membangun bidang pertahanan dan keamanan serta memerangi korupsi (Santoso, Khairunnisa, Azzahra, & Adisti, 2023f). Selain itu, sebagai bagian dari cadangan pertahanan negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan tugas-tugas seperti menyatukan dan menyatukan negara serta berpartisipasi dalam uji coba dan sosialisasi gagasan pertahanan negara. Setiap negara memiliki peran masyarakat sipil yang unik dalam menjaga negaranya. Peran masyarakat sipil dalam pertahanan nasional Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Beberapa peran masyarakat sipil dalam pertahanan nasional antara lain:

- 1) Pembinaan Kesadaran Bela Negara, masyarakat sipil membangun kesadaran bela negara dan cinta tanah air.
- 2) Kontribusi dalam Pengawasan Demokratis, masyarakat sipil membantu mengawasi demokratis.
- 3) Partisipasi dalam Pemberantasan Korupsi, peran masyarakat sipil juga penting dalam pemberantasan korupsi, yang berdampak pada kekuatan pertahanan negara.
- 3) Komponen Cadangan Pertahanan Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan tugas seperti menyatukan dan mempersatukan bangsa serta berpartisipasi dalam uji coba dan sosialisasi gagasan pertahanan negara. Dengan demikian, masyarakat sipil memegang (I. M. R. Hartanta, 2017).

Pertahanan Teritorial; Almarhum Jenderal Besar A.H. Nasution mengatakan bahwa alternatif yang tidak dapat dihindari bagi negara miskin untuk melawan tentara negara kaya adalah perang rakyat semesta. Tidak seperti doktrin perang konvensional, di mana negara miskin melawan tentara negara kaya, perang rakyat semesta adalah alternatif yang tidak dapat dihindari (Indrawan, 2015) (Santoso, Abdulkarim, et al., 2022b). Istilah yang lebih umum digunakan di Indonesia untuk mempertahankan wilayah adalah koter atau pertahanan teritorial. Ia berasal dari doktrin pertahanan kita, yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pertahanan Negara No. 3 tahun 2002, yang dikenal sebagai Sishanta (Sistem Pertahanan Semesta). Pada masa revolusi kemerdekaan, Sishanta disebut Sishankamrata, yang berarti Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Sishanta adalah ide tentang strategi Perang Semesta yang dapat digunakan oleh sebuah negara untuk melindungi wilayahnya sendiri. Mengingat aturan pertahanan Indonesia saat ini, strategi teritorial adalah yang paling cocok untuk situasi ini. Doktrin pertahanan ini berasal dari pengalaman yang diperoleh dari perang kemerdekaan.

Sebagai bagian dari pertahanan nasional, pertahanan teritorial memiliki peran. Menurut pendapat saya, pertahanan teritorial adalah strategi pertahanan yang melindungi wilayah suatu negara dari ancaman internal dan eksternal (Santoso, Karim, et al., 2023b). Pertahanan teritorial memiliki peran dalam pertahanan nasional karena melindungi negara dari ancaman langsung, menjaga kedaulatan dan integritas teritorial, memastikan keamanan sosial, dan memberikan efek penangkalan untuk menghentikan ancaman yang membatalkan Konstitusi. Kerjasama internasional yang meningkatkan ketahanan nasional suatu negara dapat dilakukan dengan berbagai cara, menurut pendapat saya, termasuk perdagangan senjata, pelatihan militer bersama, diplomasi perjanjian, dan pertukaran intelejen. Upaya Indonesia Menjalin Kerjasama Internasional Yang Dapat Memperkuat Pertahanan Nasional Dalam Sebuah Negara, dalam bukunya, Suwardi Wiraatmadja menyatakan bahwa "hubungan internasional lebih sesuai untuk mencakup segala macam hubungan antara bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia, dan kekuatan, tekanan, dan proses-proses yang menentukan cara hidup dan cara berfikir manusia." Dalam hal ini, hubungan internasional mengacu pada semua jenis hubungan antara masyarakat negara sebagai bagian dari organisasi politik global. Presiden Megawati Soekarnoputri melakukan kunjungan ke Rusia pada tahun 2003, yang menghasilkan beberapa prinsip kerja sama bilateral, termasuk kerja sama militer Indonesia-Republik Rusia, setelah perang dingin berakhir.

Selanjutnya, komando militer ini digunakan dalam dua jenis kerja sama: kerja sama pertahanan dan kolaborasi teknologi:

- a. Kolaborasi Pertahanan antara Indonesia dan Rusia: Relasi antara Rusia dan Indonesia berkembang momentum baru setelah waktu yang agak lama Vakuum. Arus balik sedang terjadi dalam hubungan antara negara-negara tersebut. Selama lawatannya ke Rusia pada 29 November hingga Januari 2006, Presiden Yudhoyono menyetujui 12 kesepakatan kerjasama, salah satunya adalah rencana kolaborasi bidang militer untuk tahun 2006-2010.
- b. Kerjasama Teknik Militer Indonesia-Rusia: Selain dalam hal pertahanan, Indonesia dan Rusia juga bekerja sama dalam hal teknologi militer. Hal ini didukung oleh seluruh anggota Fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yang akhirnya menyetujui pengesahan dan persetujuan antara Pemerintah RI dan Federasi Rusia mengenai kerjasama di bidang teknik militer. Di Gedung DPR RI, Jakarta, Wakil DPR Pramono Anum membacakan persetujuan ini sebagai perwakilan pimpinan DPR. Ketua Komisi I DPR, Dr. Mahfud Sidiq, menyampaikan tiga pernyataan yang berkaitan dengan RUU tersebut selama Sidang Rapat Paripurna. Pertama, Komisi I DPR memahami prosedur yang dilakukan pemerintah terkait kerjasama teknik militer dengan pemerintah Federasi Rusia (Jurusan et al., n.d.).

Tantangan Terbesar Dalam Membangun Ketahanan Nasional Di Wilayah Kepulauan Indonesia dan Solusi Inovatif Dapat Dikemukakan: Menurut Darmono (2010) dalam jurnal (Legionosuko et al.,

2019) dengan adanya masalah keamanan, mengubah pandangan tentang keamanan nasional dari sekuritas pusat pemerintah kepada fokus orang keamanan (Attaulloh et al., 2022). Akibatnya, keamanan menjadi lebih menyeluruh dan manajemen yang relevan keamanan yang menuntut kolaborasi hubungi pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini, keamanan nasional dianggap sebagai bagian penting dari menjaga dan menjunjung tinggi kepentingan nasional dengan memanfaatkan kekuatan militer, diplomatik, dan ekonomi untuk menghadapi ancaman dalam dan luar negeri. Konsep ini memastikan bahwa keamanan nasional di negara yang bersistem demokrasi mencakup keamanan negara, keamanan masyarakat, keamanan umum, dan keamanan manusia.

Memang, ketahanan nasional memiliki ancaman. Salah satunya adalah risiko asimetri. Menurut pandangan saya atau pengetahuan saya tentang ancaman asimetris, ancaman asimetris adalah perselisihan yang terjadi tanpa senjata fisik, tetapi menggunakan gagasan untuk menjatuhkan lawan. Ancaman asimetris ini juga sangat besar di tengah keberagaman bangsa Indonesia, jadi kita harus mengantisipasi dengan menjaga persatuan (Santoso, Karim, et al., 2023a). Pertahanan negara dilakukan oleh setiap bagian negara atau masyarakat sipil. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan dari ancaman militer dan non-militer. Ancaman ini dapat berasal dari dalam dan dari luar, termasuk ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ketahanan nasional Indonesia didorong oleh banyak faktor. Dengan mempertimbangkan berbagai komponen saat ini dan mungkin dengan mempertimbangkan sejarah perjuangan untuk kemerdekaan Saya percaya bahwa inspirasi pertama berasal dari sejarah. Perjuangan rakyat Indonesia untuk kemerdekaan. Kemerdekaan dari penjajahan Belanda menunjukkan ketekunan, semangat, dan tingginya keberanian untuk mengatasi masalah dan mencapai target nasional. Selain itu, ada Bhinneka Tunggal Ika, yang mana "Bhinneka Tunggal Ika", atau "Berbeda tetapi tetap satu", memiliki prinsip yang sama. Mencerminkan keanekaragaman agama, etnis, bahasa, dan budaya Indonesia. Sumber inspirasi. Ini menunjukkan betapa pentingnya keanekaragaman bersatu dan membentuk kesatuan nasional yang kokoh.

Ketiga, kreativitas dan kemandirian. Keberanian untuk Mereka telah menjadi inspirasi karena mereka berani dan kreatif dalam mengatasi kesulitan dan mengembangkan potensi negara. Ini benar-benar terjadi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga (Azmi Ramadhania, Almaira Putri, Ghaita Geifira Sofa, 2022). Semangat gotong royong, yang berkembang menjadi kebiasaan solidaritas sosial di Indonesia yang telah mendorong kerja sama kolektif untuk mengatasi bencana alam, krisis keuangan, dan isu sosial lainnya. Keempat, prinsip Pancasila. Untuk membangun ketahanan nasional yang inklusif dan berkeadilan, dasar negara Pancasila terdiri dari lima prinsip dasar. Kelima, peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia dapat berkontribusi pada pembentukan ketahanan nasional. Kemajuan ekonomi menciptakan stabilitas dan keamanan di negara tersebut. lingkungan dan

keberlanjutan, serta kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan lingkungan. Keprihatinan terhadap alam dan lingkungan hidup mendorong upaya untuk melindungi sumber daya alam dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Semua orang Indonesia diberi inspirasi untuk membangun ketahanan nasional yang kuat, mencapai tujuan bersama, dan menghadapi tantangan di masa depan. Ketahanan bangsa Indonesia melalui geopolitik dan geostrategi abad ke-21 akan berdampak positif pada pembangunan negara, terutama karena strategi pembangunan yang berfokus pada ketahanan nasional akan meningkatkan keamanan, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ada beberapa manfaat dari ketahanan nasional melalui geopolitik dan geostrategi ini, antara lain:

- 1) Meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia,
- 2) Meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah untuk meningkatkan ketahanan bangsa,
- 3) Menyediakan data dan saran yang akurat tentang cara memperkuat keamanan, stabilitas, dan pertahanan negara, dan
- 4) Mengurangi kemungkinan bahaya yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang meningkatkan ketahanan nasional (Pendidikan Transformatif et al., n.d.).

Menurut narasumber, masyarakat berhak berpartisipasi dalam ketahanan nasional karena sebagai warga negara, setiap individu memiliki hak untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan dan pertahanan negaranya, termasuk dalam hal ketahanan nasional. Kedua, ketahanan mencakup semua elemen, termasuk kewajiban warga negara, pelaksana dan pembuat kebijakan, dan pencegahan dan deteksi dini (Santoso, Khairunnisa, Azzahra, & Adisti, 2023f). Selain memiliki hak, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk melindungi keutuhan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, menjadi bagian dari pertahanan nasional adalah hak dan kewajiban masyarakat. Kependudukan (Gatra Kependudukan): Dalam hal pola dan ciri-ciri kependudukan Indonesia saat ini, berikut adalah poin atau hal-hal yang perlu dipertimbangkan :

1. Komposisi penduduk: Jumlah penduduk terus naik. Jika peningkatan ini akan menimbulkan konsekuensi yang merugikan, seperti ketimpangan ekonomi dan kemiskinan, serta masalah lainnya terkait demografi, jenis kelamin, agama, suku, dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda, yang diperlukan untuk meningkatkan ketahanan nasional. Ditambah lagi, kesatuan nasional harus dipertahankan melalui pengaturan populasi yang beragam di Indonesia.
2. Persebaran Penduduk: Banyak orang di Indonesia, Sumatera, dan Bali memiliki penyebaran yang tidak merata. Ini tentu menjadi masalah tersendiri bagi Indonesia. Faktor lain yang menyebabkan penyebaran penduduk yang tidak merata ini adalah ketidakmerataan "pembagian" global. Ketidakmerataan ekonomi mendorong arus urbanisasi ke kota-kota besar, menyebabkan kepadatan penduduk di kota-kota besar, yang menimbulkan masalah baru seperti organisasi kumuh, kriminalitas, kemacetan, dll.

3. Kualitas fisik: kesehatan, nutrisi, dan kebugaran.

- Faktor fisik: kesehatan, nutrisi, dan kebugaran.
- Faktor-faktor yang tidak berasal dari dunia fisik, seperti pemikiran dan kecerdasan. Tingkat kesehatan, kecerdasan, dan penyebaran pengetahuan nasional sangat terkait dengan kualitas penduduk. (Nugraha & UUD, 1945).

Seluruh gatra dalam pancagatra berfungsi dengan dukungan dari seluruh gatra dalam trigatra. Kemampuan gatra masyarakat untuk memanfaatkan potensi seluruh gatra (alamiah dan sosial) adalah kunci keberhasilan ketahanan nasional Indonesia. Hubungan antargatra adalah utuh dan integratif, dan kondisi-kondisi kehidupan nasional ditentukan secara struktural dan fungsional. Oleh karena itu, kesalahan di satu gatra dapat mengakibatkan kesalahan di gatra lain dan

Pengaruh Gatra Geografi Negara Kondisi geografi NKRI terdiri dari pulau-pulau. Memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah di lokasi lintas dunia antara benua Asia dan Australia, antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, ia berada di daerah khatulistiwa dengan tanah yang subur dan berfungsi sebagai rumah bagi negara dan masyarakatnya.

- Mempengaruhi bangsa Indonesia dalam hal bentuk, isi, dan cara bertindak, tetapi juga berdampak pada lingkungan.
- Mempengaruhi aktivitas ipoleksosbudhankam, sehingga konstelasi geografi harus digunakan untuk mencapai tujuan nasional.
- Mempengaruhi gatra politik, menghasilkan gagasan geopolitik Indonesia, Wawasan Nusantara, dan gagasan geostrategi Indonesia, Konsepsi Ketahanan Nasional.
- Mempengaruhi gatra pemeliharaan-keamanan, menghasilkan keamanan dan keutuhan wilayah merdeka dan berdaulat NKRI, dan mempengaruhi gaya hidup. Sebaliknya, hal itu dapat menyebabkan konflik dengan negara tetangga atau kehilangan pulau di daerah perbatasan, seperti Pulau Sipadan dan Ligitan.

Seandainya wilayah geografis NKRI dapat dijaga dan dipelihara kelestariannya sebagai tempat kelangsungan hidup rakyat dan negara Indonesia, maka gatra geografi negara akan berhasil. Pancagatra: Kehidupan poleksosbudhankam digerakkan dan dipengaruhi oleh gagasan ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara RI. Oleh karena itu, syarat keberhasilan gatra ideologi Pancasila sebagai bagian dari aspek ketahanan sosial nasional adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang Indonesia mengakui dan mengakui bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang harus dikembangkan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat
2. Setiap orang Indonesia memilikinya kemampuan untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila secara objektif, objektif, dan subjektif.
3. Setiap bangsa Indonesia mengakui dan menyadari bahwa mereka adalah satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dengan mengadopsi Pancasila,

mewujudkan Bhineka Tunggal Ika, dan mengembangkan gagasan Wawasan Nusantara, mereka dapat mempertahankan kesatuan bangsa dan wilayah. (Sulisworo, Dwi. Wahyuningsih, Tri. baehaqi, 2012).

Pelajar Indonesia harus berakhlak mulia menurut indikator pertama, yang berarti mereka harus hormat dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan mereka harus memahami dan menerapkan ajaran agama dan kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa komponen dari sini adalah moral beragama, moral pribadi, moral terhadap manusia, moral terhadap alam, dan moral terhadap Negara (Santoso, Fatmawati, Syafa, & Zahra, 2023b). Siswa Indonesia harus mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya dan tetap terbuka saat berinteraksi dengan orang lain, menurut indikator kedua yang menunjukkan penghinaan global. Ini akan menumbuhkan rasa saling menghargai dan memungkinkan munculnya budaya baru yang baik dan tidak bertentangan dengan budaya bangsa luhur .

Mengetahui dan menghargai budaya seseorang , kemampuan berkomunikasi dengan orang lain secara interkultural, refleksi, dan memikul tanggung jawab atas apa yang mereka alami sebagai bagian dari indikator berkebhinekaan global. Gotong Royong, indikator ketiga, yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila (Santoso et al., 2023). Dalam hal ini dijelaskan bahwa gotong royong yang dimaksud adalah kemampuan pelajar Indonesia untuk bekerja sama dengan suka rela untuk membuat kegiatan lancar, mudah, dan ringan. Profil siswa Pancasila yang menunjukkan indikator gotong royong terdiri dari hal-hal berikut: kerjasama atau kolaborasi antar siswa; kerjasama dalam konteks membantu dan membantu sesama; kepedulian, sikap penting yang diperlukan untuk mendorong perilaku gotong royong; dan berbagi, sikap mulia yang perlu dilatih. Dalam Profil Pelajar Pancasila, indikator keempat adalah mandiri. Pelajar Indonesia bertanggung jawab atas bagaimana dan apa yang mereka pelajari. Kesadaran diri, situasi yang dihadapi, dan regulasi diri adalah komponen utama profil mandiri ini. Indikator kelima dari profil siswa Pancasila bernalar kritis , yang berarti siswa mampu memproses data kuantitatif dan kualitatif secara objektif, membuat hubungan antara data, dan kemudian membuat kesimpulan. Kesadaran diri dan regulasi diri adalah komponen utama profil mandiri ini.

Ini adalah enam kriteria yang ideal untuk Profil Pelajar Pancasila Indonesia. Tidak mengherankan bahwa isinya sangat ideal karena sesuai dengan rujukannya, yaitu ideologi Pancasila (Rusnaini et al., 2021) (Santoso et al., 2023). Akhir sekali, kriteria keenam dari Profil Pelajar Pancasila adalah kreatifitas. Dalam profil siswa Pancasila ini, kreatif didefinisikan sebagai siswa yang memiliki kemampuan untuk mengubah dan membuat sesuatu yang berbeda, signifikan, membantu, dan berpengaruh. Menciptakan ide dan tindakan yang berbeda adalah salah satu ciri utama kreatif ini. Indikator kreatif ini menunjukkan bahwa menjadi orisinal sangatlah penting karena meniru atau meniru orang lain tanpa menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dapat

menjadi perilaku yang tidak baik dan bahkan merugikan. Menganggap karya orang lain sebagai karya sendiri adalah salah satu contohnya.

Konsep geostrategi Pada dasarnya, Indonesia tidak bermaksud membangun kekuatan untuk menguasai atau memperluas wilayahnya sendiri. Sebaliknya, gagasan geostrategi berpusat pada cara membangun kekuatan nasional yang dapat diandalkan untuk melindungi kedaulatan dan kemajuan negara dari ancaman dari dalam dan luar (Santoso & Murod, 2021). Pada akhirnya, Bangsa Indonesia menjadi entitas geostrategis setelah memperoleh Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Di Kotaraja pada 10 Juni 1948, Bung Karno pertama kali membahas konsep geostrategi Indonesia. Namun, seperti yang kita ketahui, Belanda menduduki bagian dari NKRI pada akhir Desember 1948, sehingga pejabat bawahannya kurang memperluas ide ini. Terakhir, garis pembangunan politik ditetapkan sebagai “*Nation and Character and Building*” setelah kemerdekaan diakui pada tahun 1950. Ini merupakan bagian dari geostrategi Indonesia secara tidak langsung, yang berarti membangun semangat bangsa.

Dari awal berdirinya hingga saat ini, berikut adalah beberapa tahapan geostrategi:

- Pada tahun 1962, geostrategi Indonesia pertama kali diajarkan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD) Bandung. Untuk menghadapi ancaman komunis di Indonesia, geostrategi Indonesia didefinisikan sebagai strategi untuk meningkatkan dan membangun kemampuan teritorial dan gerilya. Konsep ini menunjukkan pentingnya melakukan penelitian tentang strategi perkembangan lingkungan di daerah tersebut, karena pengaruh komunis semakin meningkat .
- Sebuah gagasan baru tentang geostrategi Indonesia diusulkan oleh Lembaga Ketahanan Nasional pada tahun 1965-an. Mereka berpendapat bahwa geostrategi Indonesia harus berfokus pada pembangunan daya tahan dan keuletan serta pembentukan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, tantangan, dan gangguan domestik dan internasional. Gagasan ini agak berkembang, namun masih dianggap sebagai konsep geostrategi pertama di Indonesia tentang membangun kekuatan nasional yang mampu menghadapi ancaman.
- Sejak tahun 1972 , Lembaga Ketahanan Nasional terus mempelajari geostrategi Indonesia agar lebih sesuai dengan konstitusi Indonesia . Pada saat itu, pemahaman kita tentang geostrategi Indonesia hanyalah bagaimana meningkatkan potensi ketahanan nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. integrasi nasional, dan identitas nasional.
- Namun, mulai tahun 1974, geostrategi Indonesia ditetapkan sebagai doktrin dan metode untuk pembangunan nasional. Tujuan dari pengembangan ide geostrategi di Indonesia adalah untuk:
 - a. Menciptakan dan mengembangkan kekuatan politik, ideologi, sosial budaya, dan hankam nasional, serta elemen alam untuk menjaga eksistensi dan kelestarian bangsa.

- b. Mendukung tanggung jawab utama pemerintah Kesejahteraan dan kemakmuran, penjagaan dan keamanan, keadilan hukum dan keadilan sosial adalah hal-hal yang tersedia di Indonesia dalam hal hukum dan damai. dan peluang bagi individu untuk mencapai kesuksesan (Sulisworo, Dwi. Wahyuningsih, Tri. baehaqi, 2012).

Sejarah Indonesia, terutama sejak kemerdekaan dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, mencatat banyak kesulitan, kesulitan, dan ancaman yang hampir menghancurkan kelangsungan hidup Indonesia. Kata "Ketahanan Nasional" berasal dari dua kata: ketangguhan dan keuletan. Bagaimana orang Indonesia menjalani kehidupan nasionalnya dapat menunjukkan dinamika ketahanan nasional (Nugraha & UUD, 1945) (Santoso, Abdulkarim, et al., 2022a). Berbagai tantangan dan risiko itu memengaruhi seluruh aspek kehidupan bangsa. Baik Baik secara langsung maupun tidak langsung, kondisi ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan bangsa, termasuk yang alami dan yang sosial dan kemasyarakatan. Akibatnya, ini membahayakan kelangsungan hidup dan eksistensi bangsa kita. Meskipun demikian, bangsa Indonesia masih dapat bertahan sampai saat ini berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Indonesia memiliki kemampuan untuk mempertahankan negaranya dengan tegak berdiri karena memiliki keuletan dan ketangguhan yang didorong oleh kesadaran, pengakuan, dan keinginan untuk mengembangkan kekuatan nasional yang didasari oleh Pancasila, Konstitusi UUD 1945, dan Wawasan Nusantara yang visioner. Kenyataan sejarah telah mendorong Indonesia untuk membangun Ketahanan Nasional, baik sekarang maupun di masa depan.

Kesimpulan

Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk melindungi dan mempertahankan diri dari ancaman dari dalam dan luar. Selain itu, militer bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan negara, kedaulatan, integritas wilayah, dan keamanan negara dari ancaman dari sumber internasional dan domestik. Setiap bagian negara atau masyarakat sipil bertanggung jawab untuk melindungi negara. Masyarakat sipil juga bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi keselamatan, pelestarian, dan keutuhan wilayah. negara dari ancaman, baik yang berasal dari sumber militer maupun non militer, serta dari sumber internal dan eksternal, seperti ideologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai bagian dari pertahanan nasional, pertahanan teritorial memiliki peran. Menurut pendapat saya, pertahanan nasional sendiri memahami strategi pertahanan yang melindungi wilayah negara dari ancaman. Narasumber yakin bahwa ada alasan mengapa masyarakat harus berpartisipasi dalam ketahanan nasional. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi pada proses pembangunan dan pertahanan negaranya, termasuk dalam pembentukan kekuatan pertahanan nasional. yang dapat berdampak pada kerentanan terhadap ancaman dari luar, sosial ekonomi, sumber daya yang terbatas, kemampuan pertahanan yang terbatas, ketidakseimbangan dalam pengembangan ekonomi, namun untuk mengatasi dampak yang merugikan dari ketidakseimbangan populasi terhadap

ketahanan nasional, mungkin pemerintah memiliki kemampuan untuk membuat kebijakan yang mendukung pembangunan yang merata, pengembangan infrastruktur dan pembagian sumber daya yang adil akan bermanfaat. Dengan mengurangi kerentanan terhadap ancaman dan menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di seluruh negara. Untuk memperkuat ketahanan nasional, pemerintah dapat melakukan pekerjaan sehari-hari dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketahanan nasional. Perjuangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dari penjajah Belanda menunjukkan semangat, tekad, dan keberanian yang luar biasa dalam menghadapi tantangan dan hambatan untuk mencapai tujuan nasional mereka.

Referensi

- Amalia Setyaningrum, R., Trisiana, A., & Kirana, A. (N.D.). *Geostrategi Indonesia Melalui Pendekatan Kesejahteraan Dalam Konsepsi Ketahanan Nasional Di Bidang Ekonomi*. <http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/...>
- Budisantoso, H. (1997). 11609-22405-1-Sm. *Jurnal Ketahanan Nasional*, *Ii*, 31–42.
- I. M. R. Hartanta. (2017). Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, *1*.
- Indrawan, J. (2015). Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia Dari Pertahanan Teritorial Menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan Indonesia's Paradigm Change From Territorial Defense To Maritime Defense: A Proposal. In *Jurnal Pertahanan Agustus* (Vol. 5, Issue 2).
- Jurusan, J., Pemerintah, I., Konteks, P., Pertahanan, D., Keamanan, R., Selly, S., Mamentu, M., & Tulung, T. (N.D.). *Kejasama Indonesia-Rusia Dalam Bidang Militer Dalam*.
- Legionosuko, T., Madjid, M. A., Asmoro, N., & Samudro, E. G. (2019). Posisi Dan Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Guna Mendukung Ketahanan Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, *25*(3), 295. <https://doi.org/10.22146/jkn.50907>
- Pendidikan Transformatif, J., Santoso, G., Abdulkarim, A., Maftuh, B., & Murod, Mun. (N.D.). *Kajian Ketahanan Nasional Melalui Geopolitik Dan Geostrategi Indonesia Abad 21*.
- Attaulloh, I. fajar, Wibisono, G., Febiansyah, & Santoso, G. (2022). Pemersatu Antar Negara; Perdamaian Dunia Yang Diimpikan. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, *01*(03), 16–29.
- Azmi Ramadhania, Almaira Putri, Ghaitsa Geifira Sofa, G. S. (2022). Menjadikan Warga Berjiwa : *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, *01*(03), 11–15.
- Bintang, P. R., Firdaus, M. R., & Santoso, G. (2022). *Perspektif Implementasi Pasal 31 UUD 1945 dalam Sistem Pendidikan Negara Republik Indonesia Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. *01*(03), 195–199.
- Dikutip dari Buffaloe (2006)*. (2006).
- Fahrezi, M. S., Aulia, P. A., & Santoso, G. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Membela Tanah Air dengan Segenap Jiwa : Peran dan Tanggung Jawab Generasi Muda dalam Menjaga Kedaulatan dan Kepentingan Bangsa Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, *02*(02), 391–404.
- Hutabarat, G. F. I. (2022). Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Perang Rusia-Ukraina Berdasarkan Perspektif National Interest. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, *3*(3), 154. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i3.1323>
- Meiliza, S., N, L. H., Attaulloh, I. F., & Santoso, G. (2022). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Revitalisasi Nasionalisme pada Generasi Z di Tengah Perubahan Global Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. *01*(03), 82–91.
- No Title□□□□. (n.d.). 1–106.

- Nugraha, J. T., & UUD. (1945). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析* Title. 105(3), 129–133.
- Rusnaini, R., Raharjo, R., Suryaningsih, A., & Noventari, W. (2021). Intensifikasi Profil Pelajar Pancasila dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Siswa. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(2), 230. <https://doi.org/10.22146/jkn.67613>
- Santoso, G., Abdulkarim, A., Maftuh, B., & Murod, M. (2022a). Citizenship Education Perspective : Strengths , Weaknesses , And Paradigm of the Curriculum in 2022. *Proceedings of the 1st Pedagogika International Conference on Educational Innovation, PICEI 2022, 15 September 2022, Gorontalo, Indonesia*, 2. <https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2022.2335929>
- Santoso, G., Abdulkarim, A., Maftuh, B., & Murod, M. (2022b). Curriculum Matrix Citizenship Education ; Development Perspective , Change , And Evaluation. *Proceedings of the 1st Pedagogika International Conference on Educational Innovation, PICEI 2022, 15 September 2022, Gorontalo, Indonesia*, 6. <https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2022.2335930>
- Santoso, G., Abdulkarim, A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023a). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Kajian keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Internasional untuk Perdamaian Dunia di Abad 21* *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 157–170.
- Santoso, G., Abdulkarim, A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023b). Kajian Ketahanan Nasional melalui Geopolitik dan Geostrategi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 184–196.
- Santoso, G., Abdulkarim, A., Maftuh, B., & Rantina, M. (2023a). Forming Students with Superior Character in the 21st Century for the Future of Indonesian Citizenship. *IJEED (International Journal of Entrepreneurship and Business Development)*, 06(03), 515–525.
- Santoso, G., Fatmawati, D. D., Syafa, F. A., & Zahra, H. (2023b). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) NKRI Sebagai Futuristik Hidup Bangsa Indonesia Dalam Kehidupan* *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(02), 349–353.
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023a). Kajian Integrasi Nasional dalam NKRI Tidak Dapat Diubah dan Sumpah Pemuda Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 270–283.
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023b). Kajian Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara sebagai Strategi WNI dan WNA di Dalam dan di Luar Negeri Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 241–256.
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023c). Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 210–223.
- Santoso, G., Khairasyani, I., Listiani, S., Rachmadani, N. O., Sakiinah, N., Hanjani, S. S., Kamilah, D. P., & Ainni, P. N. (2023e). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Sumpah Pemuda Sebagai Persatuan Bangsa Untuk Membangun Negara Yang Berdikari* *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(02), 360–370.
- Santoso, G., Khairunnisa, N., Azzahra, N., & Adisti, S. A. (2023f). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Filsafat Konten Nasionalisme , Patriotisme , dan Perjuangan Untuk* *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(02), 214–226.
- Santoso, G., Marcellia, L., Ramadhani, D. N., & Zabidi, S. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Lagu Daerah dan Lagu Wajib Nasional Untuk Meningkatkan Gairah Mengisi Kemerdekaan Indonesia* *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(02), 286–293.
- Santoso, G., Marsella, A. T., Permana, D. A., & Syifa, K. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Efek Pengaruh Sumpah Pemuda Terhadap Generasi Z Dalam Ikut Serta di Kegiatan Kemanusiaan* *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(02), 246–255.
- Santoso, G., & Murod, M. (2021). The Meaningfulness of Civic Education in Integrated Education Curriculum From Year 1961 - 2013 in Indonesia 21st Century. *World Journal of Entrepreneurship Project and Digital Management*, 2(2), 112–118.
- Santoso, G., Rantina, M., & Gultom, A. A. (2023). The Concept of Education : A Brief Study According to Anies Rasyid Baswedan ’ s Perspective. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 157–170.

Jupetra), 0(01), 25–29.

Santoso, G., Rizqy, H. A., Assaadih, H. H., & Bintang, R. A. (2022). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Peran Bendera Merah Putih dan Bahasa Indonesia Sebagai Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. 01(03), 183–194.

Santoso, G., Supiati, A., Komalasari, L., & Hafidah, I. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Kewarganegaraan Digital di Era Industri 4 . 0 : Tantangan dan Peluang Membangun Masyarakat Global yang Inklusif Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. 02(02), 141–146.

Santoso, G., Syahrini, N., Asbari, M., Fitriani, D., & Rantina, M. (2023g). The Total Transformation of Our Education 21st Century Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 0(01), 19–22.

Sigit Dwi, K. (2001). Sigit Dwi Kusrahmadi. *Ketahanan Nasional*, 1–15.

Sulisworo, Dwi. Wahyuningsih, Tri. baehaqi, D. (2012). [Geostrategi Indonesia]. *Universitas Ahmad Dahlan*, 1–29.

Suryatni, L. (N.D.). *403-745-1-SM*.